

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM PENGOLAHAN HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT DI KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

GILANG RAMADDHAN

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan yang signifikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam aspek pengolahan ikan. Pemerintah telah berupaya melalui program pemberian bantuan fasilitas atau alat untuk pengolahan ikan, dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang dilanjutkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Perikanan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut masih menghadapi berbagai masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi program pemberdayaan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan laut belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertitik tolak pada teori pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III. Teori ini memiliki 4 variabel yang dapat mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan dalam Pengolahan Hasil Tangkapan Ikan Laut di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal dalam pelaksanaannya, karena disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain komunikasi yang belum efektif dalam pelaksanaan program dan keterbatasan anggaran. Selain itu, jumlah staf yang terbatas serta ketiadaan insentif bagi pelaksana program juga menjadi kendala dalam optimalisasi program tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Program, Pemberdayaan Nelayan, Kabupaten Pesisir Barat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FISHERMAN'S EMPOWERMENT PROGRAM IN PROCESSING SEA FISH CATCHES IN PESISIR BARAT REGENCY

By

GILANG RAMADDHAN

Pesisir Barat Regency is one of the areas that has significant fisheries potential, both in terms of quality and quantity, which has not been optimally utilized, especially in the aspect of fish processing. The government has made efforts through a program to provide assistance in the form of facilities or tools for fish processing, with the aim of increasing the independence and welfare of the fishing community. This program is based on Law Number 7 of 2016 which is continued by the Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 10 of 2017 concerning Regional Fisheries Management. However, in its implementation, the program still faces various problems. This study aims to identify what factors cause the implementation of the empowerment program in processing marine fish catches to not run well. This study is based on the theory of the public policy implementation approach put forward by George Edward III. This theory has 4 variables that can measure the success of a program or policy. The method used in this study is descriptive with a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of the Empowerment Program in Processing Marine Fish Catches in Pesisir Barat Regency has not been optimal in its implementation, due to various factors, including ineffective communication in program implementation and budget constraints. In addition, the limited number of staff and the lack of incentives for program implementers are also obstacles to optimizing the program.

Keywords: Program Implementation, Empowerment of Fishermen, Pesisir Barat Regency.